PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS WANPRESTASI DALAM KONTRAK DIGITAL AKIBAT PENYALAHGUNAAN OTORISASI TRANSAKSI PADA APLIKASI DANA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh :

HETI SADILA

22.10.0026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Heti Sadila
Npm	: 22.10.0026
Program studi	: Hukum
program kekhususan	: Hukum Ekonomi Dan Bisnis
Judul	: **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Dalam Kontrak Digital Akibat Penyalahgunaan Otorisasi Transaksi Pada Aplikasi DANA"**

palembang, 11 Juli 2026

menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Yudi Fahrian S.H.,M.Hum	Sakinah Agustina S.H.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Erniwati S.H.,M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heti Sadila

Tempat, tanggal lahir : Banyuasin, 04 Juni 2003

NPM : 22.10.0026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilimiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 11 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan



Heti Sadila

NPM : 22.10.0026

Dipindai dengan CamScanner

ABSTAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya penggunaan dompet digital sebagai sarana transaksi elektronik, salah satunya aplikasi DANA. Kemudahan penggunaan layanan tersebut diikuti dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan otorisasi transaksi digital yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas wanprestasi dalam kontrak digital akibat penyalahgunaan otorisasi transaksi pada aplikasi DANA serta menganalisis pertanggungjawaban hukum penyelenggara aplikasi DANA terhadap kerugian konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diberikan melalui perlindungan preventif dan represif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pertanggungjawaban penyelenggara aplikasi DANA didasarkan pada hubungan kontraktual antara para pihak dan kewajiban penyelenggara untuk menyediakan sistem elektronik yang aman, andal, serta mekanisme penyelesaian pengaduan yang efektif. Apabila kerugian timbul akibat kelalaian penyelenggara, konsumen berhak memperoleh ganti rugi dan pemulihan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian pengguna atau tindakan pihak ketiga di luar kendali penyelenggara, tanggung jawab penyelenggara ditentukan berdasarkan hasil pembuktian dan investigasi terhadap penyebab kerugian tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Kontrak Digital, Penyalahgunaan Otorisasi, DANA.

ABSTRACT

The rapid development of information technology has significantly increased the use of digital wallets as a means of electronic transactions, one of which is the DANA application. However, the convenience offered by this service is accompanied by an increasing risk of unauthorized digital transaction authorization, which may cause financial losses to consumers. This study aims to analyze the legal protection provided to consumers against breaches of digital contracts resulting from unauthorized transaction authorization in the DANA application and to examine the legal liability of the DANA service provider for consumer losses. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The study relies on secondary data obtained through library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that consumer legal protection is provided through both preventive and repressive measures based on the Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the regulations of the Financial Services Authority. The legal liability of the DANA service provider is based on the contractual relationship between the parties and its obligation to provide a secure and reliable electronic system, as well as an effective complaint resolution mechanism. If consumer losses arise due to the provider's negligence, consumers are entitled to compensation and legal remedies in accordance with the applicable laws and regulations. Conversely, if the losses result from the consumer's own negligence or the actions of third parties beyond the provider's control, liability shall be determined based on the results of investigation and legal proof.

Keywords: *Legal Protection, Breach of Contract, Digital Contract, Unauthorized Authorization, DANA.*